

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG BERSIFAT MENGATUR  
(POSITIVE LEGISLATURE) DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-  
UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**Ahmad Riski, 1220113056, Universitas Andalas, 122 Halaman, Tahun 2016**

**ABSTRAK**

Tindakan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam mengeluarkan putusan yang bersifat mengatur (*positive legislature*) pada perkara pengujian undang-undang, dinilai sebagian kalangan telah melampaui batas kewenangannya. MK tidak hanya menyatakan suatu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 sehingga harus dibatalkan dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, melainkan juga telah memerankan fungsi mengatur dengan merumuskan norma sebagai pengganti bunyi undang-undang yang dibatalkan. Putusan MK yang demikian menimbulkan permasalahan dan dampak yang begitu luas serta dinilai telah mengintervensi ranah legislatif. Tidak hanya itu, sebagian putusan MK mendapat penolakan dari masyarakat karena dinilai telah bertentangan dengan norma agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah sebenarnya kewenangan MK dalam mengeluarkan putusan yang bersifat mengatur, serta apa dasar pertimbangan hukumnya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *yuridis normative*, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji dan meneliti materi hukum, yakni peraturan perundang-undangan, putusan MK, dan literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas. Sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan, wewenang MK adalah sebagai pembatal norma (*negative legislator*), bukan sebagai pembuat/perumus norma (*positive legislator*). Pertimbangan hukum MK dalam mengeluarkan putusan yang bersifat mengatur adalah demi mencapai keadilan yang substantif. Keadilan substantif akan sulit terwujud apabila MK hanya terikat dengan aturan prosedural semata, sehingga MK harus berani melakukan terobosan hukum secara progresif. Akan tetapi dalam memutus suatu perkara seharusnya MK lebih berhati-hati, tidak saja mengenai isi putusan yang akan dijatuhkan, tetapi juga harus mampu membayangkan jauh kedepan serta memahami dampak ekstrim yang mungkin timbul dari suatu putusan, sehingga tidak ada lagi putusannya yang bertentangan dengan norma agama dan mendapat penolakan dari masyarakat. Oleh karena itu diperlukan penyempurnaan melalui perubahan UUD untuk merumuskan kembali bagaimana seharusnya kewenangan MK dalam menguji konstiusionalitas suatu undang-undang. Hal ini diperlukan untuk menjamin kepastian hukum sekaligus memastikan putusan MK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

*Kata Kunci: MK, Pengujian Undang-Undang, Positive Legislature.*

**SET DECISION OF CONSTITUTIONAL COURT (*POSITIVE  
LEGISLATURE*) IN THE CASE OF LAW TESTING TOWARD THE 1945  
CONSTITUTION OF INDONESIA**

**Ahmad Riski, 1220113056, Universitas Andalas, 122 pages, Year 2016**

**ABSTRACT**

The action of constitutional court in issuing a set of *positive legislature* in the case of judicial review was criticized by some parties has exceeded the limits of its authority. Constitutional Court did not only declare the law against the 1945 Constitution, thus, it must be cancelled and revealed as it did not legally binding. It also has played the arranged function by formulating the norm as the replacement of the cancelled legislation. The following Constitutional Court's decision has posed problems and broad impacts. It considered as interfering the legislative sphere. Instead of the previous problems, some of the Constitutional Court decisions have been rejected by society because they were contrary to the religious norms. This research aimed to know how the actual authority of Constitutional Court in issuing regulation and the legal considerations. This research used normative juridical research. The research is focused on investigating and observing legal materials, such as the rules of law, the decision of the Court, and any literature related to the subject being discussed. Data collection was conducted by library research. The research findings concluded that based on the legislation rules, the Constitutional Court authorities are a negative legislators and not positive legislators. The Constitutional Court law consideration in issuing a set of decision was to achieve substantive justice. The substantive justice will be difficult to materialize if the Court is only bounded by procedural rules. The Court must have the courage to make a breakthrough progressive law. However, in deciding a case, Constitutional Court should be more careful, not only about the contents of the decision to be handed down, but also must be able to have vision and understand the extreme impact that may arise from a decision. Hence, no decision is contrary to the norms of religion and received rejection from society. Therefore, improvement is needed through changing the Constitution in order to redefine how the authority of the Constitutional Court should be in testing the constitutionality of a particular law. It is necessary to ensure the legal certainty while ensuring the decision of the Court in accordance with the legislation.

*Keywords: Constitutional Court, Law Testing, Positive Legislature*